

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ABSENSI BERBASIS ONLINE PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Baban Taofik<sup>1</sup>, Aan Anwar Sihabudin<sup>2</sup>, Etih Henriyani<sup>3</sup>

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail : B42Ntaofik@gmail.com

## ABSTRAK

*Berdasarkan hasil pengamatan awal diketahui bahwa implementasi kebijakan absensi berbasis online pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran belum diimplementasikan dengan baik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan absensi berbasis online pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan absensi berbasis online pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran belum dilakukan sesuai dengan dimensi-dimensi dalam implementasi kebijakan publik hal ini dikarenakan dimensi ukuran dan tujuan kebijakan belum dilaksanakan dengan baik mengingat masih ada pegawai yang kurang disiplin dalam penggunaan absensi berbasis online sehingga belum dapat dijadikan dasar atau acuan dalam pengambilan tambahan penghasilan, pada dimensi sumber daya belum optimal karena belum semua pegawai memberikan dukungan terhadap pelaksanaan sistem absensi berbasis online, pada dimensi karakteristik agen pelaksana penerapan absensi berbasis online kurang disertai dengan sanksi yang tegas kepada pegawai karena kurangnya dilakukan evaluasi oleh BKD terhadap hasil penerapan absensi berbasis online, dimensi sikap dan kecenderungan pegawai dalam melaksanakan penerapan absensi berbasis online diketahui belum optimal karena belum dapat meningkatkan kualitas pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, selain itu pada dimensi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana diketahui belum meningkatnya koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan BKD sehingga penerapan absensi secara online belum dilakukan evaluasi secara rutin. Pada dimensi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum optimal karena belum meningkatnya kerjasama diantara pegawai dalam bekerja.*

**Kata Kunci** : implementasi, kebijakan, absensi, berbasis online.

## PENDAHULUAN

Dalam instansi pemerintahan, semua pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut untuk memiliki sikap disiplin yang tinggi. Mereka harus menaati semua peraturan yang ada. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kedisiplinan mereka yaitu dilihat dari kehadiran. Kehadiran pegawai dibuktikan dengan sebuah daftar hadir atau absensi. Absen diisi dengan tandatangan saat datang dan tandatangan saat pulang, bukan rapel (sekaligus), bukan rekayasa dan juga bukan sekedar penuh karena ditandatangani dalam waktu yang bersamaan. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran/kecurangan tandatangan, yang merupakan menjadi salah satu indikator kedisiplinan kerja, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu untuk menggunakan mesin absensi elektronik menggantikan sistem absen manual yang selama ini terjadi. Kebijakan ini merujuk pada pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2338/M.PANRB/06/2016 Tanggal 27 Juni 2016 tentang Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan “Mengoptimalkan penggunaan sistem absensi berbasis elektronik guna menghindari adanya kecurangan dan/atau manipulasi data

yang berhubungan dengan kehadiran pegawai.”

Hal tersebut di atas dimaksudkan sebagai menunjang peningkatan kedisiplinan setiap Aparatur Sipil Negara untuk memaksimalkan kegiatan pelayanan publik bagi masyarakat. Perkembangan teknologi saat ini secara tidak langsung memberikan solusi yang lebih praktis bagi setiap permasalahan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pemerintahan di Indonesia terkhusus dalam permasalahan kedisiplinan para aparatur sipil negara terhadap kehadiran atau absensi. Ada dua jenis absensi elektronik yaitu melalui sidik jari (*fingerprint*) dan melalui wajah (*faceprint*). Sistem ini menggantikan sistem absen manual yang menggunakan tandatangan para pegawai. Sistem absensi manual dianggap tidak efektif lagi karena dapat direkayasa ataupun dicurangi. Dengan sistem elektronik ini, pemerintah berharap tingkat disiplin kerja pegawai akan lebih meningkat.

Maisaroh, (2017:30) menyatakan bahwa : “Tujuan dari penggunaan sistem absensi sidik jari (*fingerprint*) ini adalah untuk meningkatkan disiplin kehadiran kerja pegawai serta menghindari praktek manipulasi absensi”. Absensi elektronik telah diatur secara otomatis dimasukkan seluruh data setiap pegawai ke dalamnya, sehingga secara otomatis dapat mendata kehadiran dan kepulangan pegawai. Absensi sidik jari ini dianggap lebih baik daripada

penggunaan absensi manual yang bisa saja direkayasa atau dimanipulasi. Perbuatan indisipliner yang dilakukan oleh pegawai seperti ini merupakan akibat dari kurangnya kesadaran dan kesediaan untuk bertindak atau berperilaku sesuai norma dan peraturan perundang-undangan.

Meskipun pelaksanaan sistem absensi elektronik sidik jari (*fingerprint*) memiliki kelebihan dalam tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi tetap saja para oknum Aparatur Sipil Negara mencari cara agar dapat mengelabui kebijakan ini.

Begitupula berdasarkan hasil pengamatan penulis, terlihat bahwa implementasi kebijakan absensi berbasis *online* pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran belum diimplementasikan dengan baik, seperti ditunjukkan dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Belum tercapainya tujuan implementasi kebijakan absensi berbasis online. Contohnya : masih adanya beberapa pegawai masih terdapat melakukan ketidaksiplinan seperti perilaku yang dilakukan pegawai setelah melakukan absensi sidik jari (*fingerprint*) namun tidak hadir pada saat apel.
2. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana dalam melaksanakan penggunaan sistem absensi online. Contohnya : sering terjadinya masalah mesin yang tidak dapat digunakan karena rusak namun belum cepat ditangani.

3. Kurangnya sanksi yang jelas dalam penerapan sistem absensi online sehingga kurang meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam bekerja. Contohnya : laporan absensi online belum dijadikan dasar dalam memberikan sanksi kepada pegawai yang kurang disiplin.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : "Implementasi Kebijakan Absensi Berbasis Online Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran".

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan absensi berbasis online pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran?

## **KAJIAN PUSTAKA**

Dalam penelitian ini peneliti melihat adanya suatu permasalahan terkait implementasi kebijakan absensi berbasis online pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu maka peneliti melihat dari aspek kajian ilmu pemerintahan mengingat masalah tersebut menyangkut pada Implementasi kebijakan. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Suryaningrat (2011: 47) yang mengatakan bahwa :

Ilmu Pemerintahan mempelajari segala macam usaha pemerintah dalam rangka mencapai tujuan

yang telah ditetapkan untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat. Dengan kata lain ilmu Pemerintahan ini mempelajari segala kebijaksanaan pemerintah, gerak dan tingkah-laku pemerintah dalam rangka usahanya mencapai tujuan pemerintah sehingga objek forma dari ilmu pemerintahan adalah organisasi dan kebijakan pemerintahan.

Beranjak dari pandangan tersebut, maka pendekatan analisa teoritis dalam penelitian ini, berdasarkan kaidah-kaidah atau pendekatan teori yang relevan dengan kajian disiplin ilmu pemerintahan. Dimana implementasi kebijakan absensi berbasis online pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran merupakan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kedisipinan pegawai dalam bekerja.

Kebijakan merupakan suatu rencana, sikap, perbuatan, himpunan keputusan dan tindakan serta pengawasan yang terorganisir, untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui penggunaan sarana-sarana tertentu, meliputi suatu waktu tertentu dengan melalui tahap-tahap tertentu. Pelaku kebijakan dinamakan aktor-aktor, yaitu orang atau lembaga atau kelompok tertentu yang merupakan atau melaksanakan suatu kebijakan, untuk memecahkan suatu masalah yang memang perlu segera dipecahkan. Suatu kebijakan akan memiliki nilai

penting dan bermanfaat apabila adanya implementasi atas kebijakan itu.

Adapun Solichin (2008 : 112) mengemukakan bahwa : “Implementasi adalah mendesain, melaksanakan dan membangun program”. Dijelaskan juga menurut Wahab, (2014:135) bahwa implementasi adalah: “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan yang dilengkapi dengan berbagai kebutuhan.

Selanjutnya Winarno (2012:101), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: ”Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Kemudian Silalahi (2013:148) mengungkapkan pendapat yang lebih realistis mengenai pentingnya suatu

implementasi kebijakan, yakni sebagai berikut:

Hal yang paling esensial dalam kebijakan negara adalah usaha untuk melaksanakan kebijakan negara. Jika suatu kebijakan telah diputuskan, kebijakan itu tidak berhasil dan terwujud bilamana tidak dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu pelaksanaan maka kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan pemerintah merupakan kedudukan penting dalam kebijakan negara.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat diuraikan bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian rumusan kebijakan sebagai langkah awal dalam pengambilan keputusan. Sehingga dengan demikian maka kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila dilaksanakan sesuai dengan yang telah dirumuskan atau ditetapkan sebelumnya.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh dimensi-dimensi dalam implementasi kebijakan. Adapun dimensi-dimensi tersebut menurut Wahab (2014:165) antara lain Standar/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana, komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para

pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Dengan demikian maka kebijakan absensi berbasis online dalam implementasinya harus disesuaikan dengan dimensi-dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

## **METODE**

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Menurut Nawawi (2013:63), mengemukakan bahwa: “Metode deskriptif analisis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya”.

Lamanya penelitian selama 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data serta menginterpretasikannya pada data kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui implementasi kebijakan absensi berbasis online pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Pangandaran, maka berikut ini penulis sajikan hasil wawancara dengan informan yang hasilnya sebagai berikut.

### **1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pertama, aturan mengenai penggunaan sistem absensi secara online terhadap perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai sudah jelas dan tertulis dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2018 yang berisi tentang kriteria pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dengan berdasarkan prestasi kerja. Kedua, mengenai standar kebijakan juga berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 yaitu tentang Disiplin Pegawai yang menyebutkan bahwa salah satu kewajiban sebagai aparatur sipil negara adalah masuk kerja dan menaati jam kerja. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa pegawai benar-benar melaksanakan absensi dengan baik dan kebanyakan dari mereka melakukan absensi tepat waktu namun masih juga ditemukan beberapa pegawai yang terlambat dalam melakukan absensi pada pagi hari dengan alasan tempat tinggal yang jauh, ada pula yang masih sengaja melakukan keterlambatan dengan alasan waktu keterlambatannya yang masih wajar. Hal ini dapat diartikan bahwa budaya keterlambatan menjadi salah satu hal yang masih sangat sulit untuk dihilangkan dari perilaku pegawai.

Menurut Agustino (2016:113) menyatakan bahwa :

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika adanya kesesuaian tujuan dari kebijakan memang realitas dengan sosiokultur di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan, maka akan sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga sulit untuk dikatakan berhasil. Maksudnya adalah implementasi atau pelaksanaan sebuah kebijakan apapun dapat berhasil dengan baik jika dan apabila kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi tingkat penerima kebijakan.

Dengan demikian ukuran dan tujuan kebijakan dari pelaksanaan kebijakan sistem absensi online di Sekertariat Daerah Kabupaten Pangandaran sudah jelas. Adapun ukuran kebijakan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berisi salah satu kewajiban Pegawai Negeri Sipil yaitu berkaitan dengan kehadiran dan melakukan pekerjaan. Selain itu, tujuan kebijakan juga sudah jelas untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, dimana sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 tahun 2018 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Prestasi Kerja Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran secara jelas menunjukkan bahwa kebijakan Sistem Absensi Secara online digunakan sebagai perekam data kehadiran pegawai yang akan digunakan untuk menilai dan menentukan prestasi kerja pegawai yang akan berpengaruh terhadap pemberian TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai untuk pegawai Pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

## **2. Sumber daya**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana sistem absensi elektronik sudah memadai dalam menunjang pegawai melakukan absensi walaupun seiring waktu memang perangkat tersebut performanya sudah menurun serta kurangnya sistem terhubung dengan perangkat yang lain sehingga menyebabkan pegawai yang dinas luar harus kembali ke kantor untuk melakukan absensi. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa sarana dan prasarana implementasi kebijakan sistem absensi secara online sudah cukup baik, namun seiring waktu berjalan performa mesin absensi secara online mulai menunjukkan penurunan dengan lamanya mesin absensi tersebut membaca atau merekam sidik jari beberapa pegawai.

Menurut Agustino (2016:134) menyatakan bahwa :

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang

tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa ketersediaan sumber daya pada implementasi kebijakan sistem absensi online sudah cukup baik, namun seiring waktu berjalan performa mesin absensi mulai menunjukkan penurunan dengan lamanya mesin absensi tersebut membaca atau merekam sidik jari beberapa pegawai. Selain performa yang mulai menurun, belum adanya konektivitas jaringan internet juga menjadi kekurangan yang dirasakan pegawai.

## **3. Karakteristik Agen Pelaksana**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa adanya sanksi yang tegas dari pemerintah apabila ditemukan adanya pegawai yang kurang disiplin dalam bekerja. Hal ini dapat diketahui dari sistem absensi secara online karena setiap pegawai dapat dievaluasi dari sistem tersebut sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap tambahan

penghasilan yang diterima oleh pegawai. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa pegawai telah merasakan sanksi dengan diterapkannya sistem absensi online terutama bagi pegawai yang tidak masuk kerja maupun yang datang kesiangin karena tambahan penghasilan pegawai akan dikurangi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Menurut Subarsono (2013:119) menyatakan bahwa :

Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Dengan demikian kepatuhan dan dukungan semua pihak serta kedisiplinan dalam melaksanakan kebijakan akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa implementasi sistem absensi secara online sudah sesuai sebagai solusi untuk menangani perilaku pegawai yang suka melanggar aturan dan kehadiran. Dengan meningkatnya kedisiplinan dan kinerja pegawai menunjukkan bahwa solusi yang dipakai menunjukkan kesesuaian atas permasalahan kedisiplinan yang sering terjadi.

#### **4. Sikap atau Kecenderungan (Disposisi)**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pegawai kurang menyelesaikan pekerjaan secara berkualitas hal ini ditunjukkan dengan masih adanya pegawai yang kurang disiplin dalam bekerja sehingga tidak menggunakan waktunya untuk bekerja dengan efektif karena dalam kenyataannya masih ada pegawai yang berada di luar kantor pada jam kerja.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa masih adanya pegawai yang kelihatan tidak menggunakan waktunya untuk bekerja sehingga hasil pekerjaannya kurang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Oleh karena itu maka sistem absensi secara online belum dapat meningkatkan kualitas kerja yang dihasilkan karena dipengaruhi oleh kesadaran pegawai sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan.

Menurut Sujianto (2008:158) menyatakan bahwa :

Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi psikologi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Adapun yang menjadi unsur dalam motivasi tersebut adalah adanya pemahaman dan pengetahuan, adanya arah respon dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan, dan intensitas dari respon itu sendiri.

Dengan demikian sikap para pelaksana terhadap implementasi kebijakan sistem absensi online sudah

menunjukkan perubahan terhadap kedisiplinan pegawai dalam bekerja. Perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa pegawai yang bekerja di Sekertariat Daerah Kabupaten Pangandaran mendukung berjalannya sistem absensi secara online sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal karena adanya kesadaran pegawai dalam bekerja.

#### **5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam penerapan sistem absensi berbasis online maka pimpinan dan pegawai telah menjalin komunikasi terkait penggunaan perangkat tersebut sehingga dapat saling menjaga agar perangkat tersebut tidak cepat rusak dan dapat digunakan oleh pegawainya. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa telah adanya komunikasi dengan pegawai di Setda Kabupaten Pangandaran terkait dengan perawatan dan penggunaan alat tersebut hal ini terlihat dari adanya pengumuman yang ditempel dekat mesin absen yang isinya supaya menjaga alat tersebut agar tidak cepat rusak.

Menurut Subarsono (2013:90) menyatakan bahwa :

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat

dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa komunikasi dalam implementasi sistem absensi secara online di Setda Kabupaten Pangandaran sudah berjalan dengan baik. Terlihat dari evaluasi dan pelaporan yang dilakukan secara rutin sekali sebulan dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pangandaran untuk menilai prestasi kinerja pegawai berdasarkan kehadiran dan kinerja. Selain itu komunikasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika juga dilakukan terkait pengadaan mesin absensi serta masalah yang terjadi terkait mesin absensi. Adapun komunikasi antara Kepala dengan Pegawai terjalin secara lisan maupun tulisan yang dimana secara tulisan ditemukan beberapa pengumuman-pengumuman yang ditempelkan di dinding kantor.

#### **6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem absensi berbasis online telah didukung dengan berbagai peraturan yang memadai sehingga dapat diterima oleh semua pegawai di Setda Pangandaran karena dalam ketentuan tersebut ditetapkan sanksi yang jelas serta adanya reward yang jelas bagi pegawai yang memiliki kedisiplinan dalam bekerja. Begitupula

dengan hasil observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa penerapan sistem online dapat meningkatkan kedisiplinan bagi pegawai karena selain adanya sanksi yang diterapkan juga adanya tambahan penghasilan bagi pegawai apabila dapat melaksanakan sejumlah aturan atau ketentuan dalam penerapan absensi secara online.

Menurut Subarsono (2013:99) menyatakan bahwa :

Hal yang terakhir menjadi perhatian guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan lingkungan eksternal.

Dengan demikian menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi berjalannya implementasi sistem absensi secara online, adapun pengaruh lingkungan sosial yang dapat dijumpai adalah semakin ramainya aktivitas pegawai di Setda, selain itu pengaruh lingkungan ekonomi juga dapat dilihat melalui meningkatnya kehadiran dan kinerja pegawai untuk mendapatkan prestasi kerja yang baik yang nantinya akan berpengaruh terhadap pemberian

tunjangan atau penghasilan tambahan mereka.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui implementasi kebijakan absensi berbasis online pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran belum dilakukan sesuai dengan pendapat Wahab (2014:165 tentang dimensi-dimensi dalam implementasi kebijakan publik hal ini dikarenakan dimensi ukuran dan tujuan kebijakan belum dilaksanakan dengan baik mengingat masih ada pegawai yang kurang disiplin dalam penggunaan absensi berbasis online sehingga belum dapat dijadikan dasar atau acuan dalam pengambilan tambahan penghasilan, pada dimensi sumber daya belum optimal karena belum semua pegawai memberikan dukungan terhadap pelaksanaan sistem absensi berbasis online.

Pada dimensi karakteristik agen pelaksana penerapan absensi berbasis online kurang disertai dengan sanksi yang tegas kepada pegawai karena kurangnya dilakukan evaluasi oleh BKD terhadap hasil penerapan absensi berbasis online, dimensi sikap dan kecenderungan pegawai dalam melaksanakan penerapan absensi berbasis online diketahui belum optimal karena belum dapat meningkatkan kualitas pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, selain itu pada dimensi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana diketahui belum meningkatnya

koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan BKD sehingga penerapan absensi secara online belum dilakukan evaluasi secara rutin. Pada dimensi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum optimal karena belum meningkatnya kerjasama diantara pegawai dalam bekerja. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa implementasi kebijakan absensi berbasis online pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran belum optimal karena kurangnya kesadaran pegawai dalam menerapkan absensi berbasis online karena masih ada pegawai yang pulang dan keluar kantor setelah melakukan absen selain itu masih kurangnya dilakukan evaluasi oleh BKD terhadap hasil absensi berbasis online sehingga pegawai yang kurang disiplin tidak diberikan sanksi yang tegas.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai perlu adanya absensi ruangan pada jam selepas waktu istirahat sehingga pegawai kembali keruangannya selepas waktu istirahat sesuai ketentuan.
2. Sebaiknya BKD Kabupaten Pangandaran setiap bulan melakukan evaluasi secara rutin terhadap laporan yang disampaikan sehingga dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang tidak disiplin dalam bekerja.

3. Sebaiknya Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran melakukan evaluasi bukan hanya pada hasil absensi saja namun pada capaian kinerja pegawai sehingga pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai sesuai dengan kinerjanya.
4. Sebaiknya pegawai lebih bertanggungjawab dalam bekerja dan memandang pekerjaan sebagai amanah sehingga pegawai memiliki kesadaran dalam bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Faisal. (2016). *Manajemen Kinerja Perguruan Tinggi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Islamy, Muh.Irfan, (2014), *Kebijakan Publik*, Jakarta: Universitas Terbuka
- Islamy, Irfan M. (2012). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ismail. (2015). *Optimalisasi Pelaksanaan Program*. Jurnal Ketahanan Nasional, 21, 145-155.
- Silalahi, Ulbert. (2013). *Studi tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru.
- Solichin . (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi*

- kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Surbakti, (2013), *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Suryaningrat, (2011). *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, cetakan keempat, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Wahab, Solichin. (2014). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke.Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. (2014). *Administrasi Negara; Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.